

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA TANGGUH BENCANA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU**
(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH:

OLIVA RIANGHEPAT

NIM. 2016210137

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2020**

Ringkasan

Negara yang rawan bencana adalah Indonesia, karena terhitung mempunyai posisi terancam kehabisan nyawa akibat bencana. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan yaitu lewat kebijakan desa tangguh bencana (DESATANA). Pengembangan program pengurangan efek yang sanggup mengestimasi serta meminimalisir ancaman di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan desa tangguh bencana dalam penanggulangan bencana wilayah di Kota Batu. Penelitian ini memakai tata cara kualitatif dan cara pengumpulan data dengan observasi wawancara dan dokumentasi dan pengambilan kesimpulan serta menggunakan triangulasi teknik. Uji keabsahan informasi memakai triangulasi metode. Hasil penelitian menampilkan implementasi kebijakan di desa tangguh sudah berjalan secara efisien dalam tanggulangi bencana. Teori yang digunakan dalam pengolahan data yaitu Edward III implementasi dengan cakupan: sumber daya, komunikasi, disposisi, struktur birokrasi. sosialisasi langsung, sumber daya masyarakat yang mau untuk ikut serta dalam aktivitas pelatihan, disposisi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, serta struktur birokrasinya mengikuti peraturan serta tugasnya. Faktor penghambatnya yakni sumber daya yang sebagian masyarakatnya masih belum menyadari bencana adalah tugas bersama dan sumber daya anggaran yang masih belum cukup.

Kata Kunci: bencana, desa tangguh, implementasi, kebijakan, penanggulangan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan (Purnomo, 2010) mengatakan bahwa negara Indonesia secara geologis terletak pada lingkaran bencana gempa dan sekitar 1200 KM dari barat dari arah barat sampai ke arah timur ialah batasan 3 lempeng yaitu lempeng pasifik eurasia dan indo australia 87 persen warga Indonesia rawan terjadi bencana. Kota Batu merupakan suatu kota yang berada di provinsi Jatim yang merupakan pecahan dari kabupaten Malang pada tahun 2001 dan terletak 15 kilo meter dari sebelah barat kota Malang terletak di jalan Malang-Jombang. Indonesia berada pada 7 derajat 44,8 derajat 26 lintang selatan dan terletak di atas 1200 di atas laut dan diapitkan beberapa gunung yaitu gunung Arjuno dan Panderman.

Suhu yang berada di Kota Batu sekitar 18 derajat sampai dengan 24 derajat celcius dan 298 mm volume curah hujan per bulan dalam kisaran 6 hari per bulan. Dan mempunyai ciri berbeda yaitu sebelah utara dan barat. Dari letak geografis tersebut dikenal kalau letak Kota Batu terletak di wilayah pegunungan sehingga kemampuan buat hadapi bencana sangat besar sehingga mempengaruhi terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat di sekitarnya. Salah satu contoh bencana yang kerap terjadi di wilayah Kota Batu ialah tanah longsor terjal di jalur penghubung Dusun Brumbung serta Dusun Pagergunung, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji. Tebing dengan ukuran 10 m, panjang 15 m, serta lebar 6 m, hadapi longsor serta menutup akses jalur desa. Tanah longsor tersebut berpotensi sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga apalagi bisa mengancam jiwa seorang (Malang Times, 2020).

Secara umum timbul kasus yang berkaitan dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Batu sudah memiliki rencana dalam mengalami bencana. Tetapi, belum terkoordinasi penanggulangannya baik antara BPBD ataupun berbagai elemen warga khususnya bagian terpaut penindakan bencana. Disadari kalau kecenderungan peristiwa bencana di Indonesia tiap tahun terus bertambah. Penangkalan serta kesiapsiagaan di tingkatan lokal/wilayah yang dekat

dengan kemampuan bencana sangat berguna. Pemerintah wilayah yang belum memahami betul mengenai sistem penanggulangan bencana sangat mengharapkan pendampingan dari BNPB. Tapi tidak menutup bisa jadi, pemerintah wilayah lain di sekitarnya bisa serta memberikan support, baik itu pemikiran, personel, ataupun logistik serta perlengkapan. Sedangkan itu support dari pusat, khususnya BNPB, ialah bentuk konkret komitmen dalam penanggulangan bencana di Indonesia dan pencapaian visi “ Menuju Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana”.

Sesuai dengan UU tahun 2007 no 24. Yang berbunyi tentang bagaimana tanggulangni bencana adalah kejadian yang mengancam kehidupan dan nyawa dari warga . menjamin terselenggaranya penerapan . melaksanakan pengurangan resiko salah satu upaya yang dilaksanakan pengurangan resiko bencana.

Menurut chamsah 2007 menyatakan bahwa bencana kompleksitas di indonesia harus ditangani oleh seluruh pihak yang resmi paling bertanggung jawab atas keselamatan warga adalah pemerintah harus melakukan penindakan secara tegas bukan hanya mendukung secara material saja tapi moral .Sesuai dengan UU tahun 2007 NO 24 bahwa bencana adalah kegiatan yang mengecam serta mengganggu warga dan bisa merenggut nyawa. Bencana berlangsung sebab terdapat ancaman, akibat serta kerentanan. Musibah pula bisa mengancam seluruh daerah di Indonesia baik wilayah daratan, pesisir tepi laut, ataupun di wilayah pegunungan tercantum daerah Jawa Timur khususnya Kota Batu (BPBD, 2018).

Menurut (Setyawan, 2017: 20) mengatakan bahwa yang bertanggung jawab melindungi segenap warga dan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang sesuai dengan Amanat UUD 1945.bukan hanya itu saja pemangku kebijakan mempunyai kedudukan yang buat melaksanakan manajemen bencana selaku suatu usaha lingkungan yg mencakup untuk kurangi resiko bencana perlu adanya suatu penanggulangan bencana.Suatu rangkaian upaya yang meliputi kebijakan pembangunan yang meliputi rangkaian serta pasca bencana adalah penanggulangan bencana sasaran dari penanggulangan bencana ini yaitu memberikan proteksi diselaraskan sesuai dengan undang-undang yang telah terdapat diselenggarakan, ada beberapa tahapan diketahui dari pengendalian bencana .

berdasarkan Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang cara penanggulangan bencana tentang penyelenggaraan bencana yang memunculkan bencana, aktivitas penangkalan bencana, selanjutnya bersumber pada peraturan walikota kota batu no 2 tahun 2015 mengatakan kalau tanggulangi musibah merupakan totalitas sesuai dengan aturan yang berlaku serta terjalin bencana yang mencakup penangkalan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, serta memulihkan kembali akibat bencana .

Menurut (Setyawan, 2017: 92) daerah kota batu suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana yang diambil oleh BPBD kota Batu agar menjalankan implementasi kebijakan penanggulangan bencana dengan membentuk program desa bencana. proses untuk melakukan suatu kebijakan dan dijalankan setiap individu dan kelompok 2 serta swasta yang ditunjukkan sasaran target sudah diresmikan .

Didalam suatu kebijakan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh badan tanggulangi bencana yakni melaksanakan kerjasama dengan pihak desa yang terletak di wilayah Kota Batu diawali pada tahun 2014 dengan membentuk sesuatu program unggulan yang diucap dengan Desa Tangguh Bencana. Yang berlandaskan pada aturan kepala BNPB .program pembentukan desa tangguh bencana merupakan salah satu kebijakan sebagai upaya untuk kurangi resiko pada daerah kota batu yang rawan bencana. Ada beberapa fenomena yang berlangsung di BPBD kelurahan lembaga desa dalam penanggulangan bencana BPBD . BPBD Kota Batu sangat mempengaruhi dalam penanggulangan bencana yang terdapat di Kota Batu. Pengembangan program penanggulangan bencana berbasis komunitas sanggup mengestimasi sesuai dengan metode yang dilakukan adaptasi membangun kehidupan normal kembali adalah destana. Salah satu perwujudan tanggung jawab memberikan proteksi dari tanggung jawab pemerintah memberikan proteksi dengan ancaman bencana. Saat ini kota batu masi terdiri dari 11 desa yakni: Desa Gunungsari, Tulungrejo, Giripurno, Junrejo, Sumbergondo, Temas, Sumber Berantas, Punten, Ngaglik, Pesanggrahan serta kelurahan sisir. (BPBD, 2016).

kota batu sangat membutuhkan pembuatan desa suatu satuan kecil dari kota dan meminimalisir akibat bencana yang potensi di kota batu. Pembentukan desa tangguh bencana ialah salah satu kebijakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu dengan tujuan selaku upaya pengurangan resiko pada daerah yang rawan bencana. Untuk menjadi Desa Tangguh Bencana terdapat sebagian persyaratan antara lain memiliki kelembagaan ialah FPRB Desa yang di SK- kan oleh Kepala desa ataupun Lurah(Times Batu, 2020). suatu desa yang mempunyai keahlian buat mengidentifikasi ancaman di wilayahnya serta sanggup mengorganisir sumber energi warga buat kurangi kerentanan serta sekalian tingkatkan kapasitas demi kurangi resiko bencana adalah desa kelurahan tangguh bencana. Penerapan kebijakan jadi tidak sukses tanpa pelaksanaan yang efisien dari pembuatan kebijakan. Supaya penerapan kebijakan efisien, ada 4 penanda berarti yang memastikan keberhasilan program, ialah: sumber daya, komunikasi, disposisi, struktur birokrasi (Sutami, Setyawan & Fithriana, 2020: 22).

Bersumber pada latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan diatas, hingga Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “Implementasi Desa Tangguh Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Daerah(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan desa tangguh bencana dalam penanggulangan bencana daerah Kota Batu?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan desa tangguh bencana dalam penanggulangan bencana daerah Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan desa tangguh bencana dalam penanggulangan bencana daerah Kota Batu.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan desa tangguh bencana dalam penanggulangan bencana daerah Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pedoman BPBD tepatnya di kota batu agar menjalankan sesuai dengan aturan sesuai dengan SOP

2. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi pada orang yang membaca dan sebagai acuan yang peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Chamsah, Bachtiar. (2007). *Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional Manajemen Bencana. Universitas Tarumanagara.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Dyah & Chandra Dewi. (2018). *Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten*. Vol 7(7)
- Irsya Richa. (2019). <http://www.malangtimes.com/baca/37862/20190406/tanah-longsor-tutup-akses-jalan-desa-gunusrari>. Diakses pada September 2020
- Londok, Christo. (2019). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (studi di badan BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara)*.
- Kamadhis UGM. (2007). *Eka-Citta Bersatu dalam Dharma*. Buletin Kamadhis. UGM Nomor.XXVII/September/2007. Kamadhis UGM, Yogyakarta
- Moleong, J. Lexi. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rostakarya
- Paltema, Lauri. (2017). *China's changing disaster management regime*. Jurnal China Information. Vol. 7 A.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Keluruhan Tangguh Bencana.
- Poerwadarminata. (2006). *Buku Pintar Bencana Alam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, Hadi dan Ronny Sugiantoro.(2010). *Manajemen Bencana : Respon Dan Tindakan Terhadap Bencana*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Puwardarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Cetakan Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Okny. (2020). <https://inspirator.co.id/siaga-bencana-angin-kencang-di-sumber-brantas-bpbd-kota-batu-pasang-alat-deteksi-angin-kencang/>. Diakses pada 22 maret 2021.
- Setyawan, D. (2019). *Implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Smart Di Keluruhan Sisir Kota Batu*. Reformasi, vol 9(1).

- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metodel Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sutami, B. Setyawan, D. & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. *Reformasi*, vol 10(1).
- Tim Publikasi Kata data. (2018). <https://katadata.co.id/berita/2018/12/17/desa-tangguh-bencana-perlu-terus-dikembangkan>. Diakses pada Februari 2020.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widodo, J. (2017). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Analisis Proses Kebijakan)*. Malang: Media Nusa Creative.